

**PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
(STUDI BERBAGAI KASUS DI INDONESIA PERIODE TAHUN 1986-2010)**

Oleh
Sirman Dahwal

Abstract

The Result of research indicate that: (1) There is 3 style which is inveterate to be gone through to couple of PBA, for example: (a) Pursuant to Stipulating/Justice decision or Jurisprudence Appellate Court, (b) Pursuant to Authority Religion; (i) Marriage passed off according to law of each their religion, (ii) Both of couple take choice law, that is one of the couple express at one's feet of its couple law by 'making a move religion' as form subduing of law, (c) Pass off marriage beyond the sea. Some artist noted to chosen the way of this as effort of interrogating hard of him execute PBA in Indonesia, (2) Validity of PBA in Indonesia, hence having to guidance of intention Section 2 sentence (1) Law Number 1 Year 1974, expressing that marriage is validity if conducted according to law of each its religion and its trust. This matter sign that law deliver to each religion to determine the way of and its valid conditions of execution of marriage (beside the way of and conditions which have been specified by state), (3) Legal effort which can be conducted by couple of PBA if getting deduction of institution executor of marriage, like KCS (to people of non Moslem) and KUA (to Moslem people). Hence, they raise legal effort to District Court and or to Justice of Religion to get Stipulating of Justice and their application is granted. Moreover, the legal effort can be distribute to Appellate Court if in the reality get deduction of Justice. So that thereby, PBA can be executed as according to decision or stipulating of judge.

Keywords : Execution of Marriage of Difference Religion

A. PENDAHULUAN

Diantara hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang menarik untuk dikaji dalam tulisan ini adalah hukum perkawinan, karena merupakan salah satu kepentingan manusia yang mendapat aturan dalam agama (hukum) Islam, sekaligus merupakan bagian

dari kebutuhan primer, di samping kebutuhan sekunder dan kebutuhan pelengkap manusia. Oleh karena itu, perhatian terbesar dalam hukum Islam adalah menyangkut kepentingan primer tersebut. Aspek ini meliputi antara lain agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kesemua aspek tersebut merupakan tujuan hukum Islam yang di dalam

kepastakaan disebut *al-magasid al-khamsah* atau *al-magasid al-shari'ah*.¹

Perkawinan merupakan salah satu lembaga keluarga yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena, itu, setiap manusia yang normal dan telah dewasa pasti akan mendambakan perkawinan. Akan tetapi, dalam melaksanakan perkawinan itu tidak bisa dengan cara serampangan seperti hewan atau binatang karena perkawinan bagi manusia mempunyai tata cara dan aturan yang ditentukan oleh hukum, baik dalam hukum Islam (*syari'at*) maupun hukum positif. Untuk kasus Indonesia diatur melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019). Diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya dalam tulisan ini disebut Undang-undang Perkawinan), secara relatif telah dapat menjawab kebutuhan terhadap peraturan per-

undang-undangan yang mengatur perkawinan secara seragam dan untuk semua golongan masyarakat di Indonesia. Namun demikian, tidak berarti bahwa undang-undang ini telah mengatur semua aspek yang terkait dengan perkawinan. Contoh persoalan yang tidak diatur oleh Undang-undang Perkawinan adalah perkawinan beda agama, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda agama.²

Sehubungan dengan hal itu, dalam kepastakaan hukum Indonesia, muncul istilah perkawinan campuran yang mempunyai arti yang luas. Ke dalamnya termasuk juga perkawinan antara orang-orang yang berlainan kewarganegaraan, tempat, golongan, dan agama. Karena perbedaan kewarganegaraan, tempat, golongan, dan agama itu, berlainan pula hukum yang mengatur perkawinan mereka. Yang dimaksud dengan perkawinan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah perkawinan dalam arti yang sempit, yaitu perkawinan antara dua orang, pria dan wanita, yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan agama. Perkawinan yang tersebut pada kalimat terakhir ini dapat pula disebut perkawinan antara pemeluk agama yang

¹Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Keenam, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 54-55.

²Rusli & R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Pionir Jaya, Bandung, 1986, hlm. 11.

berbeda (perkawinan beda agama). Perkawinan antara dua orang yang berbeda agama, dalam kepustakaan dan juga dalam media massa, sering disebut "Perkawinan antar agama".³

Dalam perkembangannya di tengah-tengah masyarakat dewasa ini, perkawinan beda agama diistilahkan sama dengan "pernikahan lintas agama", yaitu pernikahan yang dilakukan antara seseorang yang beragama Islam (Muslim atau Muslimah) dengan orang non-Muslim, baik yang dikategorikan sebagai orang musyrik maupun Ahli-kitab. Masalah pernikahan lintas agama ini selalu menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama, hal ini karena perbedaan perspektif dalam memahami ayat-ayat atau teks-teks agama yang melarang pernikahan orang Muslim dengan orang musyrik.⁴

Meskipun perkawinan beda agama tidak diatur secara jelas dalam Undang-

undang Perkawinan, namun fenomena perkawinan semacam itu terus terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Hal itu dapat dilihat baik dari media masa maupun media elektronik, banyak sekali selebritis yang melakukan perkawinan dengan pasangan yang tidak seagama. Sebagai contoh, misalnya, dari pasangan suami isteri, Jamal Mirdad seorang seorang Muslim, menikah dengan Lydia Kandou yang beragama Kristen, Andi Vonny Gani P. (Muslimah) menikah dengan Hendrik Nelwan (Kristen), Nurul Arifin (Muslimah) menikah dengan Mayong (Katolik), Ira Wibowo dan Katon Bagaskara (Kristen), Dewi Yull (Muslimah) dengan Rae Sahetapy (yang akhirnya Rae menjadi muslim, tetapi kini telah bercerai), Ina Indayati (Muslimah) menikah dengan Jeremi Thomas yang beragama Kristen, Nia Zulkarnaen (Muslimah) dengan Ari Sihassale (Kristen), Amara (Islam) menikah dengan Francois Mohode Lingua (Kristen), Yuni Shara (Muslimah) menikah dengan Henry Siahaan (Kristen) yang kini sudah bercerai, Ari Sigit (Muslim) menikah dengan Rica Callebaut (Kristen), Bucek Depp dan Unique Priscilia, Melly Manuhutu dan Prakacha Kashmir. Kasus yang cukup terkenal adalah perkawinan artis Deddy Corbuzier yang beragama Katolik menikah dengan Kalina yang beragama Islam, yang menikah pada awal Tahun 2005 lalu. Deddy yang

³Mohamad Daud Ali, "Perkawinan Campuran Antara Orang-Orang Berbeda Agama Ditinjau Dari Sudut Agama dan Perundang-undangan Perkawinan Indonesia", dalam *Mimbar Hukum* No.8 Tahun IV 1993, hlm. 49.

⁴It. Imam Hurmain, "Pernikahan Lintas Agama dalam Perspektif Jaringan Islam Liberal (Analisis Terhadap Pemikiran JIL tentang Pernikahan Lintas Agama)", Makalah disampaikan dalam Diskusi Rutin yang diselenggarakan F.U.S. UIN Riau, Tanggal 5 Desember, 2007, hlm. 7.

Katolik dinikahkan secara Islam oleh penghulu pribadi yang dikenal sebagai tokoh dari Yayasan Paramadina.⁵ Tentunya masih sangat banyak peristiwa semacam ini yang tidak terdeteksi oleh media. Umumnya, selain undang-undang yang berlaku di Indonesia, ajaran agama ternyata sedikit banyaknya juga menjadi "penghalang" pernikahan. Sehingga di antara mereka sebagian besar berinisiatif melakukan perkawinan di luar negeri, atau cara lain yaitu mengadakan perkawinan menurut agama kedua belah pihak.⁶

Selain itu, banyak juga pasangan yang melaksanakan akad perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil. Kantor Catatan Sipil mau melaksanakan perkawinan ini berdasarkan kebijakan yang mereka ambil sendiri dengan dasar pemikiran "dari pada mereka hidup bersama di luar perkawinan, lebih baik Catatan Sipil meresmikannya saja". Namun, pihak-pihak yang akan melaksanakan akad harus membawa surat dispensasi dari Pegawai

Pencatat Nikah atau dari Departemen Agama.⁷

Dengan melihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, di mana pasangan yang berbeda agama melaksanakan perkawinan (pernikahan) dan masih memegang teguh pada agamanya masing-masing, maka akan timbul masalah dalam pencatatannya di Kantor Catatan Sipil maupun di Kantor Urusan Agama, sehingga memicu keraguan dalam prosedur dan kewenangan pelaksanaan pencatatan perkawinan beda agama. Apakah Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama akan mengeluarkan haknya untuk menolak pencatatan perkawinan beda agama atau harus melaksanakan kewajibannya melaksanakan pencatatan perkawinan beda agama tersebut. Hal itu tentu saja menimbulkan pendapat baik yang pro maupun yang kontra, menyangkut dengan pelaksanaan dan keabsahan, serta pencatatannya.

B. METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sifatnya merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan hukum empiris atau juga disebut dengan penelitian hukum empiris (*socio legal research*) atau penelitian sosial tentang hukum. Penelitian

⁵<http://indonesia.faithfreedom.org/forum/empat-cara-penyelundupan-hukum-bagi-pasangan-beda-agama-121490>, Tanggal 10 Agustus 2010.

⁶ Lt. Imam Hurmain, *Op.Cit.*, hlm. 7.

⁷ Rusli dan R. Tama, *Op.Cit.*, hlm. 37-38.

kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan holistik, yaitu pendekatan yang memerlukan berbagai informasi guna dianalisis, sehingga dapat dipahami aspek tertentu dari sikap tindak manusia. Aspek lain dari pendekatan holistik adalah pengumpulan data dilakukan secara mendalam. Penelitian ini melihat hukum sebagai gejala sosial. Fokus penelitian ini adalah perilaku manusia, baik individu maupun masyarakat, berkaitan dengan hukum. Di dalam penelitian ini masalah penelitian merupakan jarak atau kesenjangan antara sesuatu menurut hukum dengan sesuatu yang terjadi atau yang dilakukan oleh manusia. Dengan perkataan lain, masalah penelitian merupakan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*.⁸ Maksudnya adalah menjelaskan pelaksanaan aturan-aturan hukum ke dalam sosiokultural masyarakat, dengan melibatkan sosiologi dan ajaran agama yang ada dan diakui oleh negara. Hal ini dilakukan, karena penulis memfokuskan diri membahas masalah terjadinya perkawinan beda

agama. Pendekatan sosiologis dilakukan karena hukum perkawinan, khususnya mengenai perkawinan beda agama terjadi disebabkan karena proses interaksi dalam pergaulan antara manusia satu dengan manusia lainnya yang berlainan jenis kelamin dan berlainan pula agamanya.

Untuk tingkat tertentu pendekatan hukum normatif diperlukan sebagai pelengkap untuk menjelaskan pelaksanaan perkawinan beda agama yang mengacu kepada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum perkawinan, khususnya yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis Rasulullah, Kompilasi Hukum Islam, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat.⁹ Maksudnya adalah di sini hukum yang akan diperlakukan diletakkan sebagai pedoman untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia ditentukan oleh adanya dasar yuridis, ditunjuk melalui perundang-undangan negara, yaitu Pasal 29 UUD NKRI Tahun 1945, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No-

⁸ Abdul Rachmad Budiono, "Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum", Makalah disampaikan dalam Seminar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Kamis, Tanggal 6 November 2008, hlm. 3.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1986, hlm. 14-15.

mor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang kemudian Undang-undang tersebut telah dirubah dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Selanjutnya dapat pula dilihat beberapa Keputusan/ Penetapan pengadilan, seperti, antara lain: Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. : 382/Pdt/P/1986/PN. Jkt. Pst. tanggal 11 April 1986, Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 238/Pdt/P/1986/PN. Jkt. Sel. tanggal 29 Mei 1986, Yurisprudensi atau Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1986, Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 21/Pdt.P/2001/PN Kab. Semarang Tanggal

10 Desember 2001. Selain itu, dapat pula dilihat Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Munas II tahun 1400/1980 tentang Per-kawinan Campuran, dan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS.VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama, serta Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana diketahui bahwa masalah perkawinan bukan sekedar merupakan masalah pribadi dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan itu saja, tetapi juga merupakan masalah yang berkaitan dengan keagamaan yang erat sekali hubungannya dengan kerohanian seseorang. Sebagai masalah keagamaan, karena setiap agama mempunyai aturan sendiri-sendiri tentang perkawinan, maka pada prinsipnya perkawinan diatur dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dari ajaran agama yang dianut. Di samping sebagai perbuatan keagamaan, karena perkawinan ini juga menyangkut hubungan antar manusia, maka perkawinan dapat dianggap juga sebagai suatu perbuatan hukum. Dalam kenyataannya, dimanapun juga pengaruh agama yang paling dominan terhadap peraturan-

peraturan hukum adalah di bidang hukum perkawinan.¹⁰

Dalam abad kemajuan teknologi komunikasi modern dewasa ini, pergaulan manusia tidak dapat dibatasi hanya dalam suatu lingkungan masyarakat yang lingkungannya kecil dan sempit, seperti pembatalan golongan, suku, ras dan agama. Namun, hubungan antar manusia telah berkembang begitu pesatnya, sehingga menembus dinding-dinding yang sebelumnya menjadi pemisah bagi kelangsungan hubungan mereka. Adakalanya apa yang terjadi di lingkungan masyarakat belum sepenuhnya diatur secara tegas oleh perangkat peraturan-peraturan yang sudah ada, dalam kaitannya dengan masalah perkawinan dapat diambil sebagai contoh masalah perkawinan beda agama.

Keanekaragaman (pluralitas) masyarakat di Indonesia, yang menyatu dalam pergaulan hidup bersama serta ditunjang dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang, yang menyebabkan terkikisnya jurang pemisah dalam interaksi antar manusia dengan manusia yang lain.

Semakin luas dan terbukanya hubungan antar manusia tersebut mempunyai dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Dalam pergaulan hidup masyarakat tersebut sering kali mereka mengadakan perbuatan hukum, antara lain saling mengikatkan diri dalam suatu perkawinan, tidak terkecuali perkawinan beda agama yang sampai saat ini di Indonesia, masih tetap terjadi atau berlangsung, terutama pada masyarakat perkotaan yang heterogen. Namun, dalam kenyataannya ternyata perkawinan beda agama sejak dahulu hingga sekarang masih menimbulkan persoalan, baik di bidang sosial, agama maupun di bidang hukum, meskipun dalam perkembangannya dewasa ini terdapat peraturan yang melarangnya secara jelas dan tegas sebagaimana yang dijelaskan di dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 1980 dan Tahun 2005 serta Kompilasi Hukum Islam melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 yang telah berlaku di Indonesia sejak Tahun 1991 hingga sekarang ini, khususnya bagi masyarakat Islam. Walaupun demikian, bagi mereka yang sudah tidak terbelenggu cintanya yang sudah terlalu mendalam, mereka ini berupaya mencari cara untuk melangsungkan perkawinannya baik dengan cara penundukan hukum ke dalam salah satu hukum agama pasangannya atau tetap mempertahankan agamanya

¹⁰ Riduan Syahrani dan Abdurrahman, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978, hlm. 18.

masing-masing ataupun mereka melakukan perkawinan beda agama dengan mengikuti tata cara kedua hukum agama pasangan mereka masing-masing, serta ada pula pasangan yang melangsungkan perkawinannya di luar negeri, karena susahny melakukan perkawinan beda agama di dalam negeri.

Dari hasil penelitian dan penelusuran pustaka yang penulis lakukan terdapat bentuk-bentuk perkawinan beda agama yang terjadi dalam praktiknya di Indonesia, sebagaimana dikemukakan oleh Wahyono Darmabrata tentang perkawinan beda agama, di mana beliau berpendapat, ada 3 (tiga) cara yang lazim ditempuh bagi pasangan beda agama yang akan menikah.¹¹

1. Meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu. Atas dasar penetapan itulah pasangan pernikahan di Kantor Catatan Sipil. Tetapi cara ini tidak bisa lagi dilaksanakan sejak terbitnya Kepres No. 12 Tahun 1983.

2. Perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama: (i) Perkawinan terlebih dahulu dilaksanakan menurut hukum agama seorang mempelai (biasanya suami), baru disusul pernikahan menurut hukum agama mempelai berikutnya. Permasalahannya perkawinan mana yang dianggap sah. Jika perkawinan menurut hukum yang kedua (terakhir) menjadi persoalan kembali tentang status perkawinan pertama, (ii) Kedua pasangan menentukan pilihan hukum. Salah satu pandangan menyatakan tunduk pada hukum pasangannya. Dengan cara ini, salah seorang pasangan 'berpindah agama' sebagai bentuk penundukan hukum.

3. Yang sering dipakai belakangan, adalah melangsungkan perkawinan di luar negeri. Beberapa artis tercatat memilih cara ini sebagai upaya menyiasati susahny perkawinan beda agama di Indonesia.

Sejalan dengan pendapat di atas, Mudiarti Trisnarningsih dalam Bukunya Relevansi Kepastian Hukum dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia, membagi perkawinan beda agama dalam prakteknya terdapat beberapa bentuk atau model kasus. Berdasarkan hasil wawancara secara terbatas terhadap beberapa pasangan suami isteri yang memilih tetap

¹¹Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, Gitama Jaya, Jakarta, 2003, h. 102.

berpegang pada agama masing-masing, maka ditemukan beberapa cara dalam melangsungkan perkawinan. Tata cara yang mereka lakukan beserta alasan atau motivasi yang secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut.¹²

Penulis sepakat apa yang dinyatakan oleh kedua pakar hukum perdata di atas dalam kenyataannya di masyarakat kita dapat dibuktikan secara empiris. Memang demikian halnya, bahwa dalam praktiknya perkawinan beda agama dilakukan berdasarkan otoritas agama, catatan sipil, dan yang dilaksanakan di luar negeri. Hal itu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Otoritas Agama

- a. Pihak laki-laki beragama Islam dan pihak perempuan beragama Katolik yang melangsungkan perkawinan secara Katolik. Alasan pihak laki-laki bahwa Tuhan Allah tidak mungkin menghukum umatnya yang

berkehendak baik dan berbuat baik.¹³

- b. Pihak laki-laki beragama Katolik dan pihak perempuan beragama Islam yang melangsungkan perkawinan secara Katolik. Alasan pihak perempuan bahwa agama Katolik tidak memperkenankan poligami dan perceraian.¹⁴
 - c. Pihak laki-laki beragama Islam dan pihak perempuan beragama Katolik yang melangsungkan perkawinan secara Islam. Alasan pihak perempuan adalah bahwa perempuan harus turut suami.¹⁵
 - d. Pihak laki-laki beragama Katolik dan pihak perempuan beragama Islam yang melangsungkan perkawinan secara Islam. Alasan pihak laki-laki demi praktisnya saja agar disetujui oleh orang tua pihak perempuan.¹⁶
2. Berdasarkan Catatan Sipil:
- a. Pihak laki-laki beragama Islam dan pihak perempuan beragama Kristen yang melangsungkan perkawinan di Catatan Sipil. Alasan mereka karena ingin mempertahankan agama

¹² Mudiarti Trisnaningih, *Relevansi Kepastian Hukum dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2007, hlm. 58.

¹³ Hasil pembicaraan secara informal dengan Keluarga Bambang di Jakarta.

¹⁴ Hasil pembicaraan secara informal dengan Keluarga Agus di Jakarta.

¹⁵ Hasil pembicaraan secara informal dengan Keluarga Itje di Jakarta.

¹⁶ Hasil pembicaraan secara informal dengan Keluarga Leo di Bandung.

masing-masing dan tetap melangsungkan perkawinan.¹⁷

- b. Pihak laki-laki beragama Katolik dan pihak perempuan beragama Islam yang melangsungkan perkawinan di Catatan Sipil. Alasan mereka karena masing-masing orang tua melarang untuk menikah dengan tata cara agama salah satu pihak.¹⁸

3. Berdasarkan Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri

- a. Pihak laki-laki beragama Islam dan pihak perempuan beragama Kristen yang melangsungkan perkawinan di luar wilayah Indonesia. Alasan mereka karena ingin mempertahankan agama masing-masing dan tetap melangsungkan perkawinan.¹⁹
- b. Pihak laki-laki beragama Kristen dan pihak perempuan beragama Islam yang melangsungkan perkawinan di luar wilayah Indonesia. Alasan mereka karena ingin

mempertahankan agama masing-masing dan tetap melangsungkan perkawinan.²⁰

Menurut Abdul Majid, perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak lagi didasarkan pada satu akidah agama, melainkan hanya pada cinta. Seolah-olah cinta semata yang menjadi dasar suatu pernikahan. Masalah agama dalam beberapa argumen pasangan-pasangan seperti itu kira-kira dapat dirumuskan begini, "Agama tidak boleh di bawa-bawa, oleh karena agama adalah urusan pribadi seseorang. Yang terpenting kita saling mencintai apa tidak".²¹

Berdasarkan hukum munakahat yang diajarkan Islam kepada para penganutnya ialah perkawinan (pernikahan) yang dibenarkan Allah S.W.T. adalah suatu perkawinan yang didasarkan pada satu akidah, di samping cinta dan ketulusan hati dari keduanya. Dengan landasan dan naungan keterpaduan itu, kehidupan suami isteri akan tenteram, penuh rasa cinta dan kasih sayang. Keluarga mereka akan bahagia dan kelak memperoleh keturunan yang sejahtera lahir batin.

Berdasarkan ajaran Islam, deskripsi kehidupan suami isteri di

¹⁷ Lihat Pasangan Jamal Mirdad dan Lydia Kandou.

¹⁸ Hasil pembicaraan secara informal dengan Keluarga Nugroho di Bandung.

¹⁹ Lihat Pasangan Ari Sigit dan Ricca Callebut yang menikah di Amerika Serikat.

²⁰ Lihat Pasangan Nia Zulkarnaen dan Ari Sihale yang menikah di Australia.

²¹ Abdul Majid, "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Islam", dalam HTML Document, Kamis, Agustus 23, 2007, hlm. 1.

atas akan dapat terwujud apabila suami isteri memiliki keyakinan agama yang sama, sebab keduanya berpengaruh teguh untuk melaksanakan satu ajaran agama saja, yaitu Islam. Tetapi sebaliknya, jika suami isteri berbeda agama, maka akan menimbulkan berbagai kesulitan di lingkungan keluarga, misalnya dalam hal pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pengaturan tatakrama makan/minum, pembinaan tradisi keagamaan, dan lain sebagainya.²²

Islam melarang dengan tegas seorang wanita Islam kawin atau menikah dengan seorang pria non-Islam, baik musyrik maupun Ahlul-kitab. Seorang pria Islam secara pasti dilarang menikahi seorang wanita musyrik. Kedua bentuk perkawinan tersebut mutlak diharamkan. Hal ini, karena pernikahan yang berlanjut kepada lembaga keluarga bisa menjadi institusi penting dan strategis untuk memindahkan dan menanamkan nilai-nilai agama yang diyakini kebenarannya. Banyaknya kasus murtad atau pemurta dan antara lain melalui perkawinan beda agama. Adapun yang menjadi persoalan sejak

zaman sahabat Rasulullah hingga abad modern ini adalah perkawinan antara pria Islam dengan wanita Ahlul-kitab atau Kitabiyah.

Untuk memperjelas maksud dari isi serta tujuan akhir beberapa pemikiran yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis akan mencoba melihatnya dari beberapa pandangan ahli hukum Islam maupun para ulama mengenai: (1) Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah, (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (3) Kompilasi Hukum Islam, (4) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta (5) Ketentuan peraturan-peraturan lain yang ada kaitannya dengan perkawinan beda agama tersebut.

Menurut Mohammad Daud Ali, penamaan perkawinan antar agama untuk perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama adalah salah. Karena tidak mungkin ada perkawinan antar agama Islam dengan agama Nasrani, misalnya kendatipun kedua-duanya termasuk ke dalam kategori agama samawi, yakni agama yang diturunkan dari langit; tetapi dalam perkembangan kemudian akidahnya menjadi sangat berbeda. Islam sebagai agama samawi terakhir, ajarannya tentang ke-Esa-an Allah S.W.T., sebagai contoh, tetap tidak berubah-ubah, tauhid-Nya tetap murni dan konsekuen dipahami,

²² *Ibid.*

dipelihara, dan dijalankan oleh pemeluknya, kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia.²³

Perkawinan beda agama menurut hukum Islam memiliki ketentuan sendiri, antara lain laki-laki muslim boleh kawin dengan wanita non-muslim, tetapi bagi wanita muslim dilarang kawin dengan laki-laki non-muslim sebagaimana diatur secara jelas dan terinci dalam Al-Qur'an, yakni dalam surat Al-Baqarah ayat (221) dan surat Al-Maidah ayat (5), yang artinya (lebih kurang) sebagai berikut.

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita yang mukmin) sebelum mereka beriman".....(Q.s. (2): 221).²⁴

"...(dan dihalalkan kamu mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab

sebelum kamu..."(Q.s.(5): 5).²⁵

Dari ayat-ayat di atas dapat dipahami bahwa wanita Islam terlarang secara mutlak untuk melakukan perkawinan dengan laki-laki non-Islam. Di sisi lain, laki-laki Islam diperbolehkan kawin dengan wanita-wanita Islam dan wanita-wanita yang termasuk ke dalam golongan Ahlul-kitab.

Dalam literatur-literatur Islam yang berhubungan dengan persoalan di atas, tampaknya ada kesepakatan ahli hukum Islam (fuqoha) tentang persoalan pertama (larangan wanita Islam kawin dengan laki-laki non-Islam). Adapun terhadap pernyataan kedua (bolehnya laki-laki Islam kawin dengan wanita non-Islam Ahlul-kitab) masih terdapat perbedaan pendapat, yaitu sekitar persoalan agama mana saja yang tergolong Ahlul-kitab dan apakah saat ini masih ada golongan Ahlul-kitab tersebut?

Terhadap pernyataan kedua, sekalipun Islam dapat membenarkan perkawinan antara laki-laki Islam dengan perempuan Ahlul-kitab, tetapi, pada masa Rasulullah hal ini pernah dilarang, yaitu ketika Nabi melarang Kaab bin Malik yang ingin mengawini wanita Ahlul-kitab. Alasan Rasul adalah bahwa wanita tersebut tidak mungkin dapat memberikan rasa cinta yang merupakan inti dari ikatan satu perkawinan.²⁶

²³ Mohammad Daud Ali, *Op.Cit*, h. 49.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Proyek Penerbit Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta, 1976.

²⁵ *Ibid*.

²⁶ Abdul A'la Maududi, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1990, hlm. 21.

Demikian pula pada masa sahabat Khalifah Umar Ibnu Khattab beberapa tahun setelah Nabi Muhammad wafat, pernah pula melarang perkawinan antara laki-laki Islam dengan perempuan Ahlul-kitab. Ketika itu, beliau melarang Huzaifah untuk menikahi perempuan Ahlul-kitab. Ali dan Abdullah bin Umar secara terbuka mencela perkawinan laki-laki Islam dengan perempuan Yahudi dan perempuan Kristen. Dalam menunjang pen-dapatnya itu Ali bin Abi Thalib mengutip ayat Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat (22) yang artinya (lebih kurang): "Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya."²⁷

Menurut Mohammad Daud Ali, larangan perkawinan antara pria muslim dengan wanita Ahlul-kitab (non-muslim) didasarkan atas dua pertimbangan, yakni (1) Untuk melindungi kepentingan wanita Islam bersuamikan para pemimpin Islam, (2) Untuk kepentingan negara, agar jangan sampai laki-laki muslim yang memegang jabatan penting di daerah

yang baru diislamkan membocorkan rahasia negara melalui isterinya yang non-muslim itu.²⁸ Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam yang telah berlaku dewasa ini, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dalam Pasal 40 huruf (c), dirumuskan larangan perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama dengan kalimat: "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, seorang wanita yang tidak beragama Islam". Sebelumnya, melalui Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 1 Januari 1980, "mengharamkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim". Apabila perkawinan seperti ini dilangsungkan juga, menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia, K.H. Hasan Basri, perkawinan demikian merupakan perzinahan permanen.²⁹

Sejalan dengan ketentuan hukum Islam dan kalau dilihat dari sudut ajaran agama, memang semua agama di tanah air tidak mengakui perkawinan antara orang yang berbeda agama, sebab, tujuan kehidupan keluarga sebagai-mana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak akan terwujud. Banyak perkawinan

²⁸ Mohammad Daud Ali, *Op. Cit.*, hlm. 54

²⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Perkawinan dan Masalahnya*, Naskah Tutorial (S2) Pascasarjana, Jakarta, UI, 1995.

²⁷ *Ibid.*

antara orang yang berbeda agama berakhir dengan perceraian atau kalau perkawinan berlangsung terus pada umumnya kehidupan keluarga mereka tidak bulat menyatu. Sebagian anak mungkin akan mengikuti agama ibunya, dan bahkan mungkin ada anak yang tidak beragama sama sekali.³⁰

Selain permasalahan yang berhubungan dengan pengakuan negara atau pengakuan dari agama/-kepercayaan atas perkawinan, pasangan yang melaksanakan perkawinan tersebut seringkali menghadapi masalah-masalah lain di kemudian hari, misalnya saja, pengakuan negara atas anak yang dilahirkan, masalah perceraian, pembagian harta atau pun masalah warisan. Belum lagi, dampak-dampak lain, seperti berkembangnya gaya hidup kumpul kebo atau hidup tanpa pasangan yang terkadang bisa dipicu karena belum diterimanya perkawinan beda agama.³¹

Untuk mencegah terjadinya perkawinan beda agama yang masih belum diterima dengan baik oleh

masyarakat, biasanya salah satu pihak dari pasangan tersebut berpindah agama atau mengikuti agama salah satu pihak sehingga perkawinannya pun disahkan berdasarkan agama yang dipilih tersebut. Walaupun demikian, di tengah-tengah masyarakat, pro-kontra pendapat terjadi sehubungan dengan perkawinan beda agama ini. Salah satu pendapat mengatakan bahwa masalah agama merupakan masalah pribadi-sendiri, sehingga negara tidak perlu melakukan pengaturan yang memasukkan unsur-unsur agama. Namun, di pihak lain, ada yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama dilarang oleh agama, sehingga tidak dapat diterima.³²

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam sebuah seminar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 18 Mei 2006 secara khusus membahas, "masalah hukum keabsahan kawin beda agama di luar negeri". Dalam seminar tersebut, salah seorang pengamat hukum perdata, Guru besar Hukum Perdata Universitas Indonesia Prof. Wahyono Darmabrata mencatat ada empat cara yang lazim ditempuh pasangan beda agama yang akan menikah. *Pertama*, meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu. Atas dasar penetapan itulah, pasang-

³⁰ *Ibid.*

³¹ "Perkawinan Beda Agama dari Aspek Hak Asasi Manusia", Ditulis untuk MK. Hukum dan HAM @bh4kt1 2007.

³² *Ibid.*

an melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil. Tetapi cara ini tak bisa lagi dilaksanakan sejak terbitnya Keppres No. 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil. Menurut beliau, meminta penetapan pengadilan terakhir kali dilakukan oleh Andi Vonny Gani pada Tahun 1989.

Kedua, perkawinan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama. Perkawinan terlebih dahulu dilaksanakan menurut hukum agama seorang mempelai (biasanya suami), baru disusul pernikahan menurut hukum agama mempelai berikutnya. Permasalahannya perkawinan mana yang dianggap sah? Apakah perkawinan menurut hukum yang kedua (terakhir)? Jika ya, apakah perkawinan pertama dianggap tidak sah? Terhadap cara kedua ini, Wahyono menyatakan perlu penelitian lebih jauh lagi.

Ketiga, kedua pasangan menentukan pilihan hukum. Salah satu pandangan menyatakan tunduk pada hukum pasangannya. Dengan cara ini, salah seorang pasangan "berpindah agama" sebagai bentuk penundukan hukum. Dengan kata lain, salah satu

pihak dapat melakukan perpindahan agama, namun ini dapat berarti "penyelundupan hukum", karena sesungguhnya yang terjadi adalah hanya menyiasati secara hukum ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Namun, setelah perkawinan berlangsung, masing-masing pihak kembali memeluk agamanya masing-masing. Cara ini sangat tidak disarankan. Dalam agama Islam, diperbolehkan laki-laki Islam menikahi wanita non-Islam, yang termasuk Ahlul-kitab. Ayat Al-Qur'an inilah yang dipraktikkan sungguh oleh lembaga-lembaga seperti Paramadina, Wahid Institute, dan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), bahkan diperluas jadi memperbolehkan kawin beda agama bagi wanita muslim.³³

Untuk perkawinan beda agama, mantan Menteri Agama Quraish Shihab berpendapat agar dikembalikan kepada agama masing-masing. Yang jelas dalam jalinan pernikahan antara suami dan isteri, pertama harus didasari atas persamaan agama dan keyakinan hidup. Namun, pada kasus pernikahan beda agama, harus ada jaminan dari agama yang dipeluk masing-masing suami dan isteri agar tetap menghormati agama pasangannya. "Jadi jangan ada sikap saling

³³<http://indonesia.faithfreedom.org/forum/empat-cara-penyelundupan-hukum-bagi-pasangan-beda-agama-t21490>, Op. Cit.

menghalangi untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya", kata Quraish.³⁴

Pernyataan Quraish ternyata senada dengan pernyataan Romo Andang Binawan S.J., dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyakarya. Romo Andang juga menerangkan hukum gereja Katolik memperbolehkan perkawinan beda agama selama calon mempelai non-Katolik bersedia berjanji tunduk pada hukum perkawinan Katolik, monogami dan tidak bercerai seumur hidup, serta membiarkan pasangannya tetap memeluk Katolik. Sudhar Indopa, pegawai Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta, di depan Seminar tentang perkawinan beda agama yang diselenggarakan Lembaga Kajian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Indonesia tersebut, terang-terangan menyatakan negara bukannya tidak mau mengakomodir perkawinan beda agama. Larangan tersebut tidak datang dari negara melainkan dari agama. "Sepanjang tidak ada pengesahan agama, adalah tidak mungkin catatan sipil mencatat sebuah perkawinan", tandas Sudhar.³⁵

Pendapat berbeda disampaikan pengajar hukum Islam Universitas Indonesia, Farida Prihatini. Farida menegaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia melarang perkawinan beda agama. Pada prinsipnya, lanjut Farida, agama-agama lain juga tidak membolehkan, bukan hanya agama Islam. "Semua agama tidak memperbolehkan kawin beda agama. Umatnya saja yang mencari peluang-peluang. Perkawinannya dianggap tidak sah, dianggap tidak ada perkawinan, tidak ada waris, anaknya juga ikut hubungan hukum dengan ibunya. Itu zina", tandas Farida.³⁶ Ketua Program Kenotariatan Universitas Indonesia ini menolak anggapan jika dikatakan lebih baik menikah dari pada kumpul kebo. Ia menilai hukum tidak akan tegak dengan baik jika masih ada penyelundupan hukum. Selanjutnya menurut Farida, jika peraturannya sudah tegas, cukup ditegakkan saja.³⁷

Keempat, yang sering dipakai belakangan, adalah melaksanakan perkawinan di luar negeri. Soelistyowati Soegondo, salah satu anggota Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melihat banyak artis yang lari ke luar negeri, seperti Singapura dan Australia untuk melakukan perkawinan beda agama. Ia menjelaskan jika melakukan

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

perkawinan di luar negeri, berarti tunduk pada hukum di luar negeri. Pasangan tersebut mendapat akta dari negara itu, kemudian akta di bawa pulang untuk dicatatkan saja. Artinya tidak memperoleh akta lagi dari negara. Beberapa artis tercatat memilih cara ini sebagai upaya menyiasati susahnya perkawinan beda agama di Indonesia. Masalahnya, apakah perkawinan beda agama di luar negeri sah menurut hukum Indonesia?³⁸ Misalnya kalau nanti kedua pasangan suami isteri mau bercerai, apakah bisa di Pengadilan Negeri?

Lebih jauh Soelistyo Soegondo mengatakan, bagi pasangan yang telah melakukan perkawinan di luar negeri, apabila di kemudian hari mereka kembali ke Indonesia dan gagal dalam perkawinannya, mereka ingin melakukan perceraian, bisa saja dilakukan di Pengadilan Negeri. Karena secara hukum, perkawinan mereka tersebut dilaksanakan dengan sistem sipil. Karena itu pula, perkawinan dicatatkan di catatan sipil. Kalau di luar negerinya ada yang beragama Islam, tentu mereka

akan mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama. Tetapi, karena di luar negeri tidak ada Kantor Urusan Agama, maka pencatatan perkawinan mereka paling-paling di mesjid saja, itupun kalau ada mesjidnya, karena di sana tidak ada Kantor Urusan Agama".³⁹

Mengenai keabsahan perkawinan beda agama di luar negeri, menurut Wahyono Darmabrata, para pemerhati terbelah ke dalam dua arus utama. Ada yang menganggap perkawinan itu sah. Syaratnya, pasangan perkawinan beda agama mencatatkan perkawinan mereka ke Kantor Catatan Sipil paling lambat satu tahun setelah kembali ke Indonesia. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Konsorsium Catatan Sipil selama ini menganut pandangan bahwa perkawinan tidak boleh dilarang karena perbedaan asal usul, ras, agama, atau keturunan.⁴⁰

Pendapat sebaliknya menganggap perkawinan itu tidak sah karena tidak memenuhi syarat Pasal 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun tidak sah menurut hukum Indonesia, Catatan Sipil tetap menerima pendaftaran perkawinan tersebut. Pencatatan di sini bukan dalam konteks sah

³⁸ "Masalah Hukum Keabsahan Kawin Beda Agama di Luar Negeri". <http://www.hukumonline.com/>. Tanggal 30 Mei 2006.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid.

tidaknya perkawinan, melainkan sekedar pelaporan administratif.⁴¹

Guru Besar Hukum Perdata Internasional Universitas Indonesia Zulfa Djoko Basuki berpendapat perkawinan beda agama di luar negeri lebih sebagai upaya menghindari hukum yang seharusnya berlaku kepada mereka. Yaitu Pasal 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan demikian merupakan "penyelundupan hukum", dan karenanya dapat dibatalkan. Menurut Zulfa, syarat yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan bersifat memaksa. Kalaupun perkawinan itu dianggap sah, papar Zulfa, perkawinan tersebut rapuh.⁴²

Bagi mereka yang tinggal di Jakarta, ketentuannya kian jelas. Pasal 23 Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 15 Tahun 1999 menyebutkan:

- (i) Setiap perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antar Warga Negara Indonesia atau antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing atau Warga

Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan itu dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan, (ii) Setelah kembali ke Indonesia, setiap perkawinan itu dilaporkan pada Kantor Catatan Sipil. Lagi pula, lanjut Zulfa, perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri adalah perkawinan sipil yang tidak dikenal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.⁴³ Dalam hal ini menurut Farida bahwa pemerintah kita tidak tegas. Meskipun Undang-undang Perkawinan tidak memperbolehkan perkawinan beda agama, tetapi Kantor Catatan Sipil bisa menerima pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri. Dengan demikian, seharusnya yang dicatat Kantor Catatan Sipil adalah sesuai dengan hukum Indonesia. "Secara hukum tidak sah. Kalau kita melakukan perbuatan hukum di luar negeri, baru

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.* Lihat Daniel Suganda. *Pemikahan WNI di Luar Negeri dan Pola Pencatatannya*, Penutur Fajar, Jakarta, 2005, hlm. 5.

sah sesuai dengan hukum kita dan sesuai dengan hukum di negara tempat kita berada. Harusnya Kantor Catatan Sipil tidak boleh melakukan pencatatan".⁴⁴

Merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 huruf (f) Undang-undang Perkawinan di atas, pada dasarnya memang perkawinan beda agama tidak dikenal dan tidak diakui oleh hukum Indonesia. Namun demikian, tidak ada pengaturan secara tegas tentang pelarangan perkawinan beda agama dan atau beda kepercayaan. Jadi ada banyak tafsir tentang pelaksanaan dan pengakuan perkawinan beda agama di Indonesia. Sehingga untuk menentukan cara-cara pelaksanaan dan pengakuan perkawinan beda agama di Indonesia harus dikembalikan kepada hukum agama masing-masing pihak dan yang ditetapkan oleh negara.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan secara mendalam mengenai Pelaksanaan Perkawinan

Beda Agama (Studi Beberapa Kasus di Indonesia Periode Tahun 1986 - 2010), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dari hasil penelitian dan penelusuran pustaka yang penulis lakukan ada 3 (tiga) model yang lazim ditempuh bagi pasangan beda agama yang akan melaksanakan perkawinan mereka, yaitu: (1) Berdasarkan Penetapan/Putusan Pengadilan atau Yurisprudensi Mahkamah Agung, (2) Berdasarkan Otoritas Agama; (a) Perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama. Perkawinan terlebih dahulu dilaksanakan menurut hukum agama seorang mempelai (biasanya suami), baru disusul pernikahan menurut hukum agama mempelai berikutnya yaitu isteri. Permasalahannya perkawinan mana yang dianggap sah. Jika perkawinan menurut hukum yang kedua (terakhir) menjadi persoalan kembali tentang status perkawinan pertama; (b) Kedua pasangan menentukan pilihan hukum (*choice of law*). Salah satu pandangan menyatakan tunduk pada hukum pasangannya. Dengan cara ini, salah seorang pasangan 'berpindah agama' sebagai bentuk penundukan hukum, (3) Yang sering dipakai belakangan, adalah me-

⁴⁴ *Op.Cit.*

laksanakan perkawinan di luar negeri. Beberapa artis tercatat memilih cara ini sebagai upaya menyisiasi susahnyanya perkawinan beda agama di Indonesia.

- b. Sahnya perkawinan beda agama di Indonesia, maka terlebih dahulu harus dipelajari dan dipahami maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Hal ini mengisyaratkan bahwa undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut (di samping cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh negara). Jadi, suatu perkawinan dilarang atau tidak, atau apakah calon mempelai telah memenuhi syarat-syarat atau belum, di samping tergantung kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, juga ditentukan oleh

hukum agamanya masing-masing. Lembaga agama diberikan wewenang untuk mengesahkan suatu perkawinan.

Perkawinan beda agama dipandang dari agama Islam, agama Katolik dan agama Protestan, serta agama Hindu dan Budha, kecuali agama Khonghuchu, pada dasarnya tidak diperkenankan untuk dilaksanakan. Namun, masing-masing agama dalam melayani umatnya, mempunyai aturan-aturan tersendiri dalam mengatur perkawinan beda agama, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dapat memberikan pengesahan bagi terselenggaranya perkawinan beda agama tersebut, yaitu dengan mengeluarkan Surat Perkawinan (pernikahan) mereka. Sedangkan menurut agama Khonghuchu tidak permasalahan bagi pria maupun wanita menentukan pasangannya masing-masing. Dasar hukum yang dipakai oleh pihak terkait dalam menyelesaikan masalah perkawinan beda agama adalah selain berpedoman kepada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, juga berpedoman kepada pasal-pasal lain, seperti, Pasal 8 huruf (f), Pasal 66 Undang-undang

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Penjelasan Umum Nomor 5 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (melaksanakan peraturan-peraturan yang ter-muat dalam GHR) merupakan pedoman hakim Pengadilan Negeri untuk mengabulkan perkawinan beda agama.

- c. Bagi pasangan perkawinan beda agama yang mengalami hambatan untuk melaksanakan perkawinan mereka dapat mengajukan upaya hukum guna mendapatkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum perkawinan mereka. Upaya hukum yang bisa dilakukan karena adanya penolakan pelaksanaan perkawinan mereka oleh Kantor Catatan Sipil ataupun oleh Kantor Urusan Agama, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang disebabkan adanya perbedaan agama dari kedua calon mempelai. Oleh karena itu, mereka mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri

ataupun ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan Putusan/Pene-tapan

Pengadilan dan permohonan mereka dikabul-kan. Malahan upaya hukum tersebut dapat diteruskan ke Mahkamah Agung apabila ternyata mendapat penolakan dari pengadilan. Sehingga dengan demikian, perkawinan beda agama dapat dilaksanakan sesuai dengan hasil Putusan atau Penetapan Hakim Mahkamah Agung selaku lembaga penegak keadilan yang terakhir bagi rakyat sebagai wakil Tuhan dalam memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, khususnya kepada pasangan perkawinan beda agama. Karena itu, misi Mahkamah Agung berkenaan tugas negara yang harus melayani kepentingan warga negara.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran, sebagai berikut :

- a. Oleh karena ketidakjelasan dan ketidaktegasan mengenai pengaturan perkawinan beda agama dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka sebaiknya Undang-undang Perkawinan tersebut diadakan penyempurnaannya (direvisi), terutama mengenai adanya perbedaan pendapat

para ahli hukum tentang sah atau tidaknya perkawinan beda agama. Sebaiknya pasal-pasal yang menyinggung tentang perkawinan beda agama di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan secara jelas dan tegas, sehingga tidak menimbulkan perdebatan bagi masyarakat pada umumnya dan ahli hukum pada khususnya.

- b. Sebagai seorang Muslim, upaya strategik yang perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas kehidupan beragama adalah tetap menjalani apa yang digariskan hukum Islam dan hukum positif secara normatif dalam hal perkawinan sebagaimana dipahami umat Islam saat ini, mengingat perkawinan beda agama yang dilegalkan oleh kelompok Islam lainnya, mau tidak mau akan membawa suatu dampak psikologis-sosiologis yang negatif ketika dibenturkan dengan realitas masyarakat muslim kebanyakan saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul A'la Maududi, *Kawin dan Cerai Menurut*

Islam, Gema Insani Press, Jakarta, 1990.

Abdul Majid, "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Islam", dalam HTML Document, Kamis, Agustus 23, 2007.

Abdul Rachmad Budiono, "Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum", Makalah disampaikan dalam Seminar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Kamis, Tanggal 6 November 2008.

Daniel Suganda, *Pernikahan WNI di Luar Negeri dan Pola Pencatatannya*, Penutur Fajar, Jakarta, 2005.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Proyek Penerbit Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta, 1976.

It.Imam Hurmain, "Pernikahan Lintas Agama dalam Perspektif Jaringan Islam Liberal (Analisis Terhadap Pemikiran JIL tentang Pernikahan Lintas Agama)", Makalah disampaikan dalam Diskusi Rutin yang diselenggarakan F.U.S. UIN Riau, Tanggal 5 Desember, 2007.

Mohamad Daud Ali, "Perkawinan Campuran Antara Orang-Orang Berbeda Agama

Ditinjau Dari Sudut Agama dan Perundang-undangan Perkawinan Indonesia", dalam *Mimbar Hukum* No. 8 Tahun IV 1993.

Mohammad Daud Ali, *Hukum Perkawinan dan Masalahnya*, Naskah Tutorial (S2) Pascasarjana, Jakarta, UI, 1995.

....., *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Keenam, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Mudiarti Trisnaningsih, *Relevansi Kepastian Hukum dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2007.

Riduan Syahrani dan Abdurrahman, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978.

Rusli & R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan*

Masalahnya, Pionir Jaya, Bandung, 1986.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1986.

Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, Gitama Jaya, Jakarta, 2003.

Mahkamah Konstitusi, "Perkawinan Beda Agama dari Aspek Hak Asasi Manusia", Hukum dan HAM @bh4kt1 2007.

Internet

<http://indonesia.faithfreedom.org/forum/empat-cara-penyelundupan-hukum-bagi-pasangan-beda-agama-t21-490>., Tanggal 10 Agustus 2010.

<http://indonesia.faithfreedom.org/forum/empat-cara-penyelundupan-hukum-bagi-pasangan-beda-agama-t21-490>.

Tanpa Penulis, "Masalah Hukum Keabsahan Kawin Beda Agama di Luar Negeri", <http://www.hukumonline.com/>. Tanggal 30 Mei 2006.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Munas II tahun 1400/1980 tentang Perkawinan Campuran, dan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005

tentang Perkawinan Beda Agama, serta Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah.